

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti penting bagi segala aspek kehidupan manusia. Kegunaan hutan telah dialokasikan untuk produksi kayu dan hasil produk kayu tersebut banyak diekspor ke negara lain. Fungsi hutan memiliki berbagai potensi kegunaan, sehingga entitas-entitas yang ada didalam hutan harus dilindungi melalui legalitas hukum yang berlaku. Produk kayu menjadi sumber utama penghasil devisa negara dari sektor non migas setelah minyak dan gas bumi. Setiap tahun, Inggris menjadi negara yang mengonsumsi sekitar 500.000 m³ kayu agar dapat memanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yakni biomassa (Greenslade, 2020). Inggris menjadi negara keempat terbesar yang mengimpor kayu dari luar negeri setelah Jepang, China, dan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat Inggris tidak dapat memanfaatkan peluang potensial lebih banyak pada sumber daya kayu. Hal ini membuat Inggris melihat Indonesia sebagai peluang bagi pasokan produk kayu. Inggris merupakan mitra importir terbesar Indonesia untuk perdagangan kayu berkelanjutan dan lestari (Bisnis, 2020). Produk kayu Indonesia yang dinilai ramah lingkungan hidup disambut baik oleh pasar Inggris karena mampu mempermudah proses ekspor-impor dengan kayu yang telah disertifikasi.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia. Kesadaran atas luasnya lahan hutan, kerap membuat negara Indonesia terus berupaya mendorong industri pengolahan kayu dan komoditi ekspor kayu. Namun, seiring berjalannya waktu Indonesia memiliki kesulitan atas pasokan bahan baku kayu. Bahkan, negara Indonesia harus kehilangan sekitar 23,33 juta meter dengan kerugian materil sebesar 27 triliun rupiah setiap tahun (Kompas, 2008). Angka tersebut setara dengan 680.000 hektar dari lahan hutan yang rusak akibat deforestasi (Yusuf, 2012). Salah satu penyebab maraknya kejadian ini adalah *Illegal Logging* (pembalakan liar). Tingginya kebutuhan akan produksi kayu yang lebih besar dibandingkan ketersediaan kayu dari hutan, menyebabkan banyak pengusaha kayu melakukan penebangan hutan tidak terkendali. Akibatnya, industri kehutanan Indonesia menggunakan pasokan kayu yang diperoleh dari pembalakan liar (MediaIndonesia, 2015). Kondisi ini yang menyebabkan perdagangan kayu ilegal (*Illegal Logging*) marak terjadi di Indonesia.

Kerugian ini telah tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi devisa negara dari produksi hutan, tetapi juga meningkatnya kerusakan hutan Indonesia. Oleh karena itu, *Illegal Logging* dipandang sebagai suatu kejahatan transnasional memiliki dampak multidimensi bagi isu global. Adanya *Illegal Logging* telah memberikan dampak terhadap penyusutan produksi kayu maupun distribusi kayu yang legal di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan dilematis bagi Inggris mengenai produksi kayu-kayu Indonesia yang akan dikonsumsi oleh Inggris. Untuk

itu, sebagai salah satu tujuan ekspor produk kayu Indonesia, Inggris memberikan dukungan untuk memperkuat tata laksana sektor kehutanan di Indonesia. Inggris membentuk suatu integrasi yang lebih dalam, dengan menjalin kerjasama dengan Indonesia yang berfokus pada Program Kerjasama Kehutanan melalui *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP) tahun 2000 (MFP, 2000). Program ini didukung oleh *United Kingdom Department for International Development* (UK-DFID) yang telah terlaksana di Indonesia mulai dari MFP fase 1-3 sampai fase 4 yang kembali diperpanjang. Penandatanganan perjanjian kerjasama fase ke-4 telah disepakati oleh kedua pihak pada 3 September 2018 agar melanjutkan pertumbuhan dalam bisnis hutan berbasis masyarakat (KLHK, 2018). Setiap tahunnya, Inggris melalui MFP memberikan finansial bagi Indonesia guna mengatasi masalah produksi kayu legal dan memerangi *Illegal Logging*.

Melalui pemerintah Indonesia oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), MFP menjadi pilar penting untuk meningkatkan perhatian besar terhadap produk kayu berkelanjutan Indonesia di pasar global. Inggris juga menjamin produk kayu Indonesia telah terverifikasi bebas *Illegal Logging* melalui kesepakatan bilateral implementasi *Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT-VPA)* melalui pemberian dukungan sepenuhnya terhadap program kerjasama VPA Indonesia-Uni Eropa (KEMLU, 2020). Maka dari itu, Inggris melakukan penanganan *Illegal Logging* di Indonesia

yang dimulai dengan menandatangani *MoU on Addressing Illegal Logging*, lalu berlanjut dengan pembentukan program kerjasama MFP yang turut merumuskan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dengan demikian, peningkatan kebutuhan kayu di Inggris membuat Inggris melanjutkan program kerjasama MFP fase-4 serta guna menjadi kontribusi penuh bagi Inggris untuk bekerjasama dengan Indonesia mengatasi persoalan *Illegal Logging* agar lebih maksimal. Sehingga, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan kayu yang baik dan legal agar dapat dikonsumsi oleh Inggris. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa Inggris berusaha membentuk kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi *Illegal Logging* melalui dorongan Kerjasama *Multistakeholder Forestry Programme* fase 1 sampai fase 4 yang diperpanjang kembali. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab kerjasama Inggris yang ditujukan untuk negara Indonesia melalui *Multistakeholder Forestry Programme* fase 1 sampai fase 4 untuk menghadapi permasalahan lingkungan utamanya pada kasus *Illegal Logging* di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa Inggris ingin membentuk kerjasama dengan Indonesia melalui program *Multistakeholder Forestry Programme*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan mengetahui analisis, pemahaman dan pengembangan dari penelitian yang akan diteliti, yakni:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana tujuan kebijakan luar negeri Inggris melalui program kerjasama kehutanan *Multistakeholder Forestry Programme*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepentingan Inggris kepada Indonesia dalam mengatasi *Illegal Logging* di Indonesia melalui program *Multistakeholder Forestry Programme* fase 1 sampai fase 4 yang kembali diperpanjang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segi akademis maupun segi praktis, antara lain:

1.4.1. Akademis

Penelitian diharapkan ini memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan serta memperluas ruang lingkup akademis Studi Hubungan Internasional mengenai kerjasama Indonesia dengan Inggris dalam program *Multistakeholder Forestry Programme* dengan berfokus mengkaji Kepentingan Inggris dalam membentuk kerjasama dengan Indonesia memerangi *Illegal Logging*.

1.4.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memahami dinamika terbaru dan memperluas wawasan mengenai isu *Illegal Logging*. Lalu, dapat berkontribusi untuk memberikan gambaran bagi peneliti lain tentang Kepentingan Inggris dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran baru bagi masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan terkait kajian mengenai Inggris yang mengelola tata hukum Indonesia dalam memerangi *Illegal Logging*.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian yang berfokus membahas kepentingan Inggris dalam memerangi *Illegal Logging* di Indonesia melalui program *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP) fase 4 masih belum begitu banyak dijumpai dikarenakan program ini baru kembali diperpanjang tahun 2018. Penelitian-penelitian

sebelumnya yang sesuai dengan topik yang saya bahas adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Mia Risa Himalia (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Analisa Bantuan Luar Negeri Inggris dalam Skema Kerjasama *Multistakeholder Forestry Program 3* di Jepara”. Penelitian ini menjelaskan mengenai terjadinya *Illegal Logging* di Jepara sehingga Inggris yang menganut norma domestik memberikan bantuan kepada Jepara dalam penerapan SLVK secara maksimal. Penelitian ini juga merujuk pada pembentukan kerjasama Inggris dalam MFP di Jepara. Lalu, penelitian kedua dituliskan oleh Antoko Ridho (2019) dengan judul “Implementasi kerjasama Indonesia-Inggris dalam kerangka *Multistakeholder Forestry Programme 3* (MFP 3) terhadap peningkatan produk kayu Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegakan hukum dan tata kelola hutan serta implementasi kerjasama Indonesia-Inggris kerangka MFP fase 3 untuk meningkatkan produk-produk kayu yang diperoleh Indonesia. Melalui program kerjasama *Multistakeholder Forestry Programme* serta menjadikan Indonesia tata kelola hutan yang baik dan menjamin produk kayu Indonesia bebas dari *Illegal Logging*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih jauh bagaimana kepentingan Inggris dalam kerjasama yang telah berlangsung sejak MFP fase 1 sampai MFP fase 4 di Indonesia. Penulis mencoba menggali kepentingan Inggris dengan menggunakan teori Realisme Neoklasik sebagai sebuah metode yang baru untuk memahami fenomena kerjasama ini.

Sebagaimana kerjasama MFP Indonesia Inggris banyak dimaknai melalui pendekatan Konstruktivisme oleh karenanya, menarik untuk digali lebih jauh apakah kepentingan Inggris dalam MFP merupakan bentuk keadaan domestik dan sistem internasional yang identik melekat pada Realisme Neoklasik. Secara spesifik menarik ulang untuk dikaji keterlibatan Inggris melalui MFP fase-4 dari perspektif Realisme Neoklasik. Oleh karena itu, menggunakan teori Realisme Neoklasik penelitian ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait kepentingan yang melatarbelakangi Inggris memberikan kerjasama bagi permasalahan lingkungan utamanya *Illegal Logging* di Indonesia.

1.5.1 Teori Realisme

Dalam studi Hubungan Internasional, Teori Realisme muncul sebagai arus utama yang telah mengalami perkembangan akibat ketidaksempurnaan pandangan idealis. Realisme merupakan sebuah pemikiran klasik yang menawarkan cara pandang dunia terhadap politik internasional dengan cenderung mengedepankan kepentingan nasional (Budiono, 1987). Kaum realisme beragumen bahwa tidak adanya keharmonisan yang terjalin diantara negara-negara, dimana semua negara mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Maka, dasar normatif realisme adalah kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional (Jackson R. &., 1999). Yang mana dilihat dari hubungan internasional, dalam persaingannya negara-negara yang kuat akan berusaha mencapai dominasi kekuatan dan memperoleh

keamanan. Suatu kerjasama dalam perspektif realisme dipandang semata-mata hanya sebagai jalan untuk keselamatan dari negara itu sendiri serta mencapai suatu kepentingan nasional. Kaum realisme mendefinisikan anarki sebagai tidak adanya kekuatan dominan yang dapat mengatur negara lain. Sehingga, pemikiran realisme percaya bahwa aktor adalah negara. Dalam konteks ini, negara diasumsikan sebagai suatu entitas yang memiliki sifat rasional dan tunggal (unitary) (Saeri, 2012). Oleh sebab itu, seluruh kesepakatan internasional baik sebuah perjanjian, aturan, konvensi, hukum dan lain sebagainya sewaktu-waktu dapat dikesampingkan jika berlawanan dengan kepentingan negara.

Dalam pandangan realisme, negara merupakan aktor dominan yang mempunyai otoritas serta kedaulatannya masing-masing. Selain menjelaskan aktor yang mengejar kepentingan nasionalnya, penulis akan lebih berfokus dengan menggunakan teori Realisme Neoklasik sebagai pisau analisis yang dianggap dapat menjelaskan politik domestik dan sistem internasional suatu aktor untuk merumuskan kebijakan luar negerinya.

1.5.2. Teori Realisme Neoklasik

Dalam menjelaskan penelitian secara mendalam, peneliti menggunakan teori Realisme Neoklasik untuk menjelaskan suatu fenomena internasional. Realisme Neoklasik merupakan semacam perspektif untuk melihat paradigma hubungan internasional yang mengintegrasikan pandangan dari Realisme. Realisme

Neoklasik hadir sebagai penggabungan elemen dari Neorealisme dan Realisme Klasik. Teori Realisme Neoklasik muncul sebagai kepanjangan dari teori Realisme sebagai penyempurna agar semakin kompleks. Dalam gagasannya, teori ini menciptakan pandangan baru dengan menggabungkan perpaduan antara Realisme Klasik dan Neorealisme. Teori Realisme Neoklasik dikenal secara signifikan pada tahun 1998 tepatnya dicetuskan oleh Gideon Rose pada bujunya yang berjudul *“Neoclassical Realism and Theory of Foreign Policy”*. Realisme neoklasik menjadi suatu perspektif yang menjembatani antara sistem internasional (faktor eksternal) dan situasi domestik (faktor internal) dan adanya interaksi kompleks yang dilakukan dalam mempengaruhi suatu kebijakan (Rose, 1998).

Gideon Rose mengemukakan perspektif Realisme Neoklasik sebagaimana argumen dalam tulisannya yang menyebutkan ruang lingkup kebijakan luar negeri tidak langsung kompleks, adanya analisis variable penghubung (*intervening variables*) di tingkat unit (Rose, 1998). Oleh sebab itu, analisis mengenai kekuatan perlu diselidiki melalui struktur pemerintahan atau hubungan suatu negara dengan masyarakatnya. Karenanya hubungans ini dapat memberikan hasil pada kepentingan nasionalnya dan pembagian sumber daya nasional agar dapat menganalisis politik luar negeri. Realisme Neoklasik mempunyai premis dasar strategi negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya dapat ditempuh melalui strategi domestik dan tujuan domestik yang ditempuh melalui strategi internasional. Secara keseluruhan, dalam bukunya gagasan yang dicetuskan bahwa dalam

perumusan kebijakan luar negeri, tujuan rasional menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepas agar melihat faktor perilaku dari suatu negara (Rose, 1998). Rose menegaskan bahwa adanya pengaruh internasional menjadi faktor determinan yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Aliran Realisme Neoklasik mempercayai bahwa jika ingin memperoleh gambaran yang utuh tentang kebijakan yang dihasilkan suatu negara, negara tidak dapat mengecualikan variable domestik. Kekuatan negara dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda, yakni hubungan suatu negara dengan masyarakat maupun interaksi aktor di lingkungan eksternal pula. Hubungan ini dapat menciptakan pengaruh pada kepentingan nasional suatu negara untuk menganalisis politik luar negerinya. Secara khas, kepentingan nasional suatu negara menjadi tujuan fundamental dan faktor yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya (Morgenthau, 1951). Dengan demikian, perspektif ini memunculkan gagasan bahwa pentingnya merumuskan suatu kebijakan yang didasarkan pada kepentingan nasional negara. Tradisi pemikiran teori ini bertujuan untuk melengkapi pemikiran dari Neorealisme dengan menghidupkan kembali gagasan Realisme Klasik (Mastanduno, 1989). Sehingga, teori Realisme Neoklasik didasarkan pada konsep-konsep yang memperhitungkan unsur politik domestik dan juga lingkungan eksternal suatu negara.

Teori ini berfokus pada menjelaskan perilaku negara individual dalam pembentukan kebijakan luar negeri (Kitchen, 2010). Variasi pengambilan kebijakan luar negeri terjadi karena setiap negara memiliki respons yang beragam terhadap *structural constraint*. Dalam pandangan teori ini, elemen yang menentukan kebijakan luar negeri membahas mengenai strategi negara-negara besar dan dapat diterapkan pada negara kecil dan menengah. Suatu negara akan berupayakan mempertahankan kepentingan nasional melalui strategi yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan dan keputusan tersebut yang menjadi lahirnya suatu kebijakan luar negeri (Perwita, 2005). Pemikiran ini sangat memperhitungkan unsur politik domestik dan lingkungan eksternal suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, cara pandang realisme neoklasik dapat menjelaskan kemungkinan respon ekonomi, militer, maupun cara-cara diplomatik dari negara tertentu terhadap sistem internasional.

Realisme Neoklasik memusatkan perhatiannya kedalam cara pandang berbeda, yakni dalam modelnya secara khusus melibatkan variable internal dan eksternal suatu negara. Hal ini dikarenakan peluang ancaman dapat muncul dari kedua lingkungan tersebut. Selain itu, pihak eksekutif pengambilan kebijakan luar negeri berada di posisi tengah-tengah yang menjembatani politik domestik dan internasional negara. Disamping itu, membahas mengenai strategi kebijakan di negara-negara besar, namun hal ini dapat pula diterapkan di negara menengah maupun kecil. Teori ini memandang bahwa negara cenderung merespon

ketidakpastian dunia internasional dengan berusaha mengontrol lingkungan eksternal mereka (Jackson R. &, 1999). Realisme Neoklasik percaya bahwa adanya distribusi kekuatan (*power*) serta sistem internasional yang bersifat anarki menjadi penentu utama kepentingan maupun perilaku suatu negara. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kekuatan yang dimiliki suatu negara di hubungan internasional dengan meliha (kekuatan yang relative) *relative material power* yang menjadi dasar ukuran dalam pemutusan kebijakan luar negeri (Rose, 1998). Kekuatan ini sebagai langkah agar negara dapat membentuk keinginannya. Rose percaya bahwa sebuah negara tidak hanya mencari keamanan dalam hubungan internasional yang anarki, melainkan dalam menentukan kebijakan luar negeri sebagai respon dari adanya ketidakpastian sistem anarki dengan memperkuat pengaruhnya dan mencari kontrol di lingkungan eksterna. Pengaruh yang dimiliki suatu negara menjadi aspek penting dalam lingkungan internasional agar mendapatkan interest dari negara tersebut (Rose, 1998).

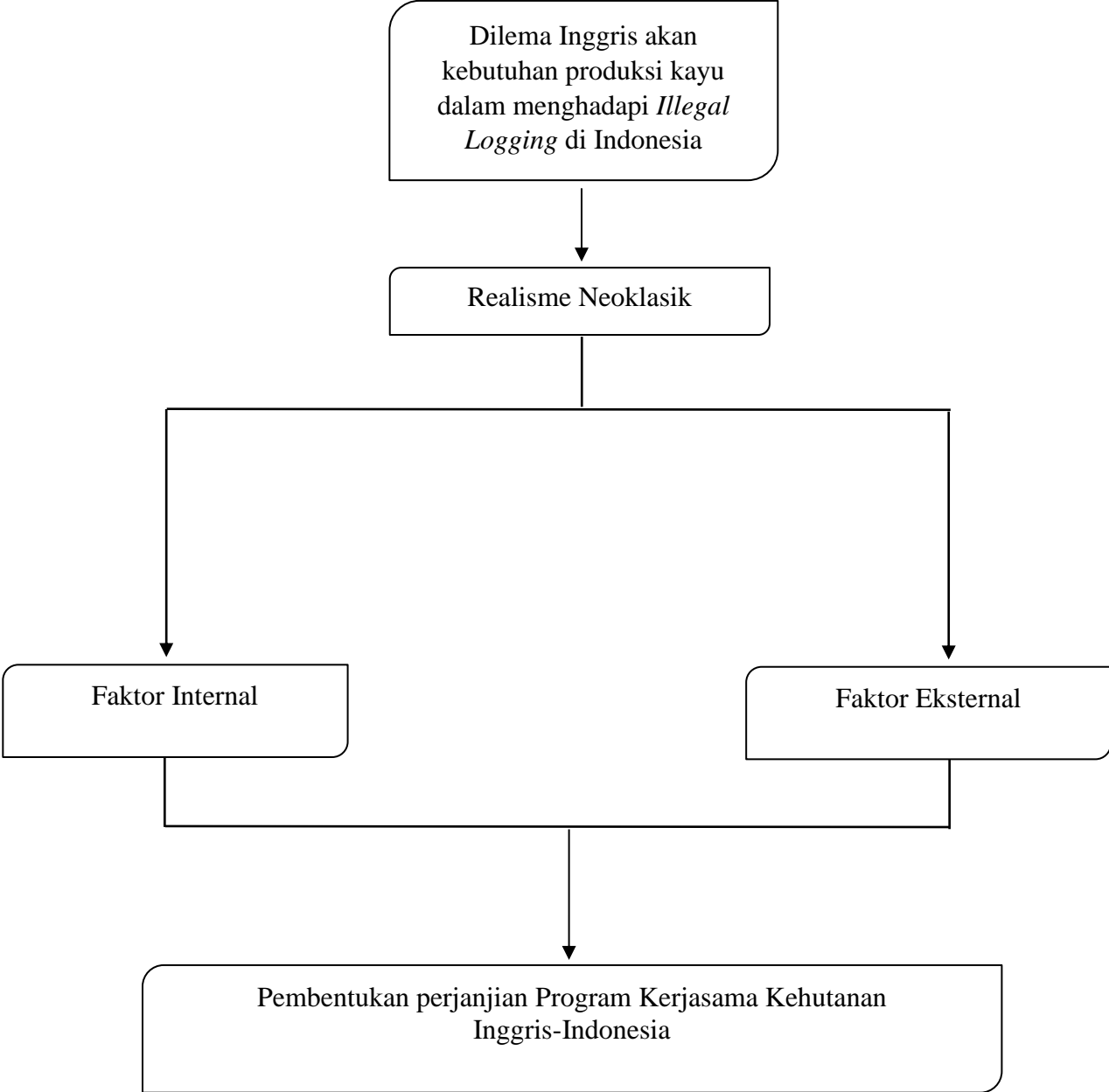
Asumsi dasar teori ini memandang tindakan suatu negara dibatasi oleh politik domestik dan internasional. Artinya, pengaruh dari sistem internasional harus didasarkan pada kapabilitas suatu negara seperti sumber daya alam, sosial, militer, ekonomi serta karakter internal yang mampu mempengaruhi peluang dalam dunia internasional ataupun kebijakan luar negeri yang ingin dicapai (E. Lobell, 2009). Melalui kaca mata Realisme Neoklasik dapat dipahami bahwa suatu negara dalam merespon politik internasional menjadi elemen vital dsalam menentukan

kelangsung hidup bagi warga negaranya. Dengan demikian kaum Realisme Neoklasik memperkenalkan gagasan baru yang terkesan diabaikan oleh para pemikir Realisme dan Neoklasik. Kaum Realisme Neoklasik meyakini bahwa politik domestik (karakteristik internal negara) sangat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri sebagai strategi yang diterapkan dalam melindungi kepentingan nasionalnya.

Hal ini dapat ditinjau untuk mengetahui bagaimana negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya yang dapat dilihat melalui faktor internal dan eksternal guna mencapai suatu tujuan maupun kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, melalui analisis Realisme Neoklasik dapat dipahami pemutusan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Inggris dipengaruhi oleh pengaruh kondisi domestiknya serta lingkungan internasional sebagai langkah mencapai kepentingan nasionalnya.

Maka dari itu, dalam membantu pembaca memahami penjelasan di atas dan analisis dalam penelitian ini, penulis akan menyajikannya ke dalam alur skema penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Skema Alur Pikir Penelitian



1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Illegal Logging* (Pembalakan Liar).

Illegal Logging (Pembalakan Liar) dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan ataupun aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu untuk ke tempat pengolahan kayu tanpa adanya izin dari otoritas legal yang berlaku hingga kegiatan penjualan impor-ekspor kayu telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak sah (Zain, 2003). Praktik *Illegal Logging* telah dipandang sebagai suatu aktivitas yang secara perlahan dapat mengikis lahan hutan dan berakibat merusak hutan. Tindakan tersebut mencakup kegiatan yang telah melanggar hak atas lahan hutan, maupun korupsi untuk memperoleh aktivitas pengelolaan keuangan dan produksi hasil hutan, dari tahap perencanaan, pengangkutan bahan mentah, sampai produk jadi. Tindakan ini dapat mempengaruhi ekosistem hutan menjadi buruk serta merujuk pada industri hutan terkait kayu ataupun non kayu akibat adanya kegiatan yang Illegal.

1.6.1.2 Kepentingan Nasional

Penulis mendefinisikan Kepentingan Nasional sesuai yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau (1951) untuk menganalisis penelitian ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kepentingan nasional menjadi kapasitas maupun kemampuan minimum yang dilakukan oleh suatu negara dalam mempertahankan maupun

melindungi identitas politik, kultur, serta fisik dari adanya gangguan atau ancaman dari negara lain. Kepentingan Nasional menjelaskan pemimpin negara atau elite politik yang dapat merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya dapat berupa konflik maupun kerjasama. Morgenthau memberikan pandangan dengan menyebutkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) yang dibuat suatu negara didasari pada kepentingan nasionalnya serta tujuan agar mencapai apa yang diinginkan dan yang dikategorikan sebagai “Kepentingan Nasional”. Sehingga, kepentingan nasional Inggris ingin wujudkan untuk mencapai langkah agar mendapatkan produk kayu-kayu legal dari Indonesia.

1.6.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan definisi Kebijakan Luar Negeri berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita (2005). Kebijakan Luar Negeri dapat diartikan sebagai sebuah “*action theory*”, atau merupakan aksi atau keputusan suatu negara yang ditujukan ke negara lain agar aksi ini dapat mempengaruhi untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri terdiri sebagai suatu pengambilan keputusan yang didasari strategi kepentingan dalam kancah politik internasional. Dengan demikian, program kerjasama yang dibentuk Inggris menjadi bukti bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan sebagai cara untuk mencapai kepentingan domestiknya.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1. *Illegal Logging* (Pembalakan Liar).

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus *Illegal Logging* yang berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam punahnya hutan tropis di Indonesia. Maraknya *Illegal Logging* yang terjadi menjadi kekhawatiran karena dapat bertransformasi menjadi kejahatan transnasional akibat legalitas hukum yang masih lemah untuk diterapkan. *Illegal Logging* memiliki dampak multidimensi terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, terlebih ekologi. Permasalahan *Illegal Logging* telah menjadi isu lingkungan global akibat tidak tercapainya kelestarian hutan. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar hutan di Indonesia tidak lagi menjadi sasaran bagi pihak yang melakukan *Illegal Logging*

1.6.2.2. Kepentingan Nasional

Penelitian ini memandang Kepentingan Nasional bahwa sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan merupakan dasar dalam merumuskan kebutuhan negara yang paling vital. Dalam hal ini, kepentingan nasional Inggris berupaya untuk mengarahkan Indonesia agar terus mendorong komoditi ekspor kayu legal. Oleh karena itu, dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Mempertanyakan alasan apa yang melatarbelakangi Inggris untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia.

- b. Mempertanyakan bagaimana proses interaksi Inggris agar dapat mengajak Indonesia untuk melakukan kerjasama.
- c. Mempertanyakan apa kepentingan nasional yang ingin diwujudkan oleh Inggris dengan Indonesia.

1.6.2.2. Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini menggunakan Kebijakan Luar Negeri sebagai bentuk keputusan maupun komitmen bertindak agar mampu menghadapi situasi tertentu, Inggris membentuk kerjasama kehutanan sebagai salah satu kebijakan luar negerinya agar mencapai instrument kepentingannya. Dengan demikian, untuk mendapat data-data tersebut adalah:

- a. Mempertanyakan apa kesepakatan yang dibentuk oleh Inggris dan Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Indonesia
- b. Mempertanyakan bagaimana strategi kebijakan luar negeri yang dilakukan Inggris dalam membangun interaksi dengan Indonesia.
- c. Mempertanyakan bagaimana hasil yang diperoleh dari adanya kerjasama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia utamanya *Illegal Logging*.

1.7. Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini memunculkan argumen dari peneliti yakni kepentingan Inggris dalam berkontribusi pada program *Multistakeholder Forestry Programme*

fase 1 sampai fase 4 yang kembali diperpanjang merupakan perwujudan Inggris dalam meningkatkan kebutuhan kayu domestiknya. Inggris telah menjadi konsumen produk lingkungan kehutanan yang terus mendorong komoditi impor kayu legal dari Indonesia. Kebijakan Luar negeri melalui program kerjasama ini menjadi langkah yang dirancangan oleh Inggris agar terus mengatasi *Illegal Logging* dan memaksimalkan produksi komoditi kayu di Indonesia sebagaimana upaya mempertahankan kepentingan Inggris dalam mempromosikan perdagangan komoditas yang legal dan terciptanya hutan lestari.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Menurut Sugiono, metode kualitatif ialah metode penelitian untuk meneliti objek yang akan dilakukan oleh peneliti berupa analisis data bersifat induktif dengan lebih menekankan makna daripada secara *general* (Sugiyono, 2007). Metode ini dapat digunakan untuk menjelaskan gambaran mengenai situasi dengan intepretasi yang tepat dan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui dan mendeskripsikan lebih mendalam. Sehingga, dapat memahami suatu masalah lebih mendalam dan memahami lebih komprehensif dan kompleks.

1.8.1. Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui dua sumber antara lain data primer dan data sekunder. Menurut Umi Narimawati, data primer merupakan data utama untuk mendapatkan data sumber asli atau pertama (Narimawati, 2008). Pengumpulan data primer dapat diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara atau observasi secara langsung. Selain itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui *desk research* dimana studi pustaka dengan tahapan mentelaah data dan reduksi data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh melalui artikel, jurnal-jurnal internasional, berita, buku-buku, literature pendukung, website pemerintah, dan sumber-sumber lain yang kredibel yang sesuai dengan penelitian penulis agar dapat mencari informasi secara mudah. *Desk Research* bertujuan untuk memperoleh data dengan membaca arsip dokumen maupun literatur yang tersimpan di perpustakaan dan berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 2003). Sehingga, dengan data sekunder yang mencari data melalui internet dapat memudahkan menganalisis kumpulan-kumpulan data dan menafsirkan masalah penelitian.

1.8.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat eksplanatif. Penelitian Eksplanatif berusaha menjelaskan hubungan antar variable yang diteliti menggunakan pengujian hipotesis (Burhan, 2010). Penelitian ini

mencoba menjelaskan bagaimana kepentingan Inggris dalam memerangi *Illegal Logging* yang terjadi Indonesia melalui perspektif Realisme Neoklasik.

1.8.3. Situs Penelitian

Situs penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah di Indonesia. Secara khusus penelitian ini akan berusaha memperoleh data yang berkaitan dengan kondisi wilayah kehutanan di Indonesia.

1.8.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah negara Inggris, yang mana Inggris mengambil peran penting untuk melakukan kerjasama kehutanan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi *Illegal Logging*.

1.8.5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data secara tulisan bukan angka, dimana banyak berasal dari bahan-bahan tertulis berupa uraian secara rinci (Patton, 1990).

1.8.6. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2000, yang mana awal mula program kerjasama kehutanan *Multistakeholder Forestry Programme* terbentuk. Hingga tahun 2018 program tersebut kembali dilanjutkan sampai 2021 untuk memerangi *Illegal Logging* yang terjadi di Indonesia.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kongruen, dimana dalam metode kongruen menggunakan data-data empiris yang dianalisis menggunakan teori yang akan digunakan. Metode ini mencoba menjelaskan hasil dalam kasus tertentu dengan sebuah teori (George, 2005). Metode ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian menyeleksi data yang sesuai dengan kerangka berpikir yang dipilih untuk mencari hubungan sebab-akibat. Teknik ini diharapkan dapat menganalisis data secara mendalam melalui suatu kasus.

1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian rumusan masalah yang diajukan penulis dan juga teori yang akan digunakan. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.
- b. BAB II: Bab ini berisikan deskripsi mengenai kebutuhan Inggris terhadap pasokan kayu Indonesia, gambaran *Illegal Logging* secara detail dan bagaimana permasalahan kasus *Illegal Logging* di Indonesia serta kerja sama antara Indonesia dengan Inggris di sektor kehutanan.

Bab ini juga berupaya menjelaskan hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Inggris.

- c. BAB III: Bab ini berisikan analisis kepentingan Inggris dalam *Multistakeholder Forestry Programme* di Indonesia serta tujuan Inggris membentuk kebijakan luar negeri dengan kerjasama Indonesia. Bab ini berupaya menjawab rumusan masalah dan dengan menggunakan teori yang telah dipilih.
- d. BAB IV: Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisi evaluasi dalam pembuatan penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi penelitian di masa mendatang.